

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGANYARI*
NIKAH PADA PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* KARENA
KETIDAKSESUAIAN WETON
DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh
Chukum Nur Rohmawati
NIM. C71214069



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chukum Nur Rohmawati*

NIM : C71214069

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada

Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidak Sesuaian Weton

Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

A green rectangular stamp with the text "PASTA BAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem on the right, and the number "6000" at the bottom. The text "ENAM RIBURUPIAH" is at the very bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Chukum Nur Rohmawati

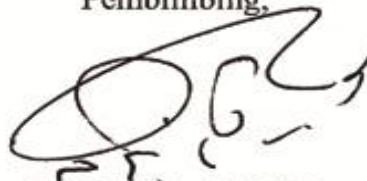
NIM. C71214069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chukum Nur Rohmawati NIM. C71214069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 April 2018

Pembimbing,



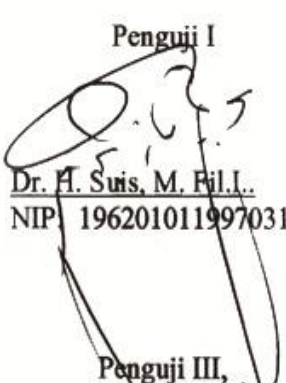
Dr. H. Suis, M. Fil.I.
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

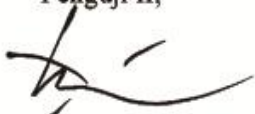
Skripsi yang ditulis oleh CHUKUM NUR ROHMAWATI NIM C71214069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

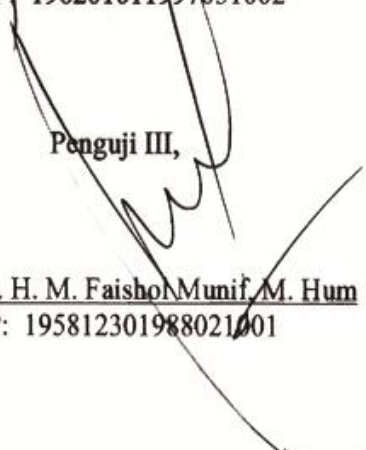
Penguji I


Dr. H. Suis, M. Fil.I..
NIP. 196201011997031002


Penguji II,


Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP: 196707271996031002

Penguji III,


Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP: 195812301988021001

Penguji IV,


Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP:198912292015032007

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Yasin, M.Ag., M.H.
NIP. 196707271996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHUKUM NUR ROHMAWATI
NIM : C71214069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : chukumnur@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGANYARI NIKAH PADA

PERKAWINAN NGEBO BINGUNG KARENA KETIDAKSESUAIAN WETON DI DESA

MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis

(CHUKUM NUR ROHMAWATI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.**” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena hitungan weton yang tidak sesuai, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena hitungan weton yang tidak sesuai tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di desa Menganto dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Namun ada yang membedakan, pada pelaksanaan tradisi ini tanpa menggunakan adanya mahar baru, dan yang mengijabkan adalah seorang Kyai desa atau mudin setempat serta hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga terdekat saja. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan yang ada dalam keluarga.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap alangkah baiknya jika para tokoh masyarakat menjelaskan terkait dengan pelaksanaan *nganyari nikah* kepada masyarakat, khususnya bagi tokoh agama yang benar-benar paham hukum Islam secara mendalam agar masyarakat yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* tidak terlalu mempercayai akibat dari hitungan weton tersebut dan menjelaskan terkait hakikat dari dilakukannya tradisi *nganyari nikah* tersebut, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan harus diniatkan semata-mata karena Allah. Hal tersebut disampaikan juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang bertentangan dengan aturan syariat Islam.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERA.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasioanal	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Perkawinan	20
1. Pengertian dan Hukum Perkawinan	20
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	24
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	32
4. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	36
5. Hikmah Perkawinan	38
B. <i>Tajdīdun Nikāh (Nganyari Nikah)</i>	38

1. Pengertian <i>Tajdīdun Nikāh</i> (<i>Nganyari Nikah</i>)	38
2. Tujuan <i>Tajdīdun Nikāh</i> (<i>Nganyari Nikah</i>)	39
3. Pandangan Para Ulama Terkait Dasar Hukum <i>Tajdīdun Nikāh</i> (<i>Nganyari Nikah</i>).....	40

BAB III TRADISI *NGANYARI NIKAH* PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* DI DESA MENGANTO KECAMATAN MOJOWARNO 44

A. Gambaran Umum Desa Menganto.....	44
1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Menganto.....	44
2. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Menganto.....	46
3. Pendidikan Masyarakat Desa Menganto	46
B. Tradisi <i>Nganyari Nikah</i> Pada Perkawinan <i>Ngebo Bingung</i> Karena Ketidakesuaian Weton	47
1. Pendapat Pelaku <i>Nganyari Nikah</i> Terhadap Perkawinan <i>Ngebo Bingung</i> Karena Ketidakesuaian Weton	48
2. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Menganto Terhadap Perkawinan <i>Ngebo Bingung</i> Karena Ketidakesuaian Weton	51
3. Dampak Negatif Perkawinan <i>Ngebo Bingung</i>	55
C. Hitungan Weton Dalam Tradisi <i>Nganyari Nikah</i> Menurut Masyarakat Desa Menganto	58

BAB IV TRADISI PERKAWINAN *NGEBO BINGUNG* DI DESA MENGANTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 68

A. Pelaksanaan Perkawinan Para Pelaku <i>Ngebo Bingung</i>	68
B. Pelaksanaan <i>Tajdīdun Nikāh</i> (<i>Nganyari Nikah</i>) Para Pelaku <i>Ngebo Bingung</i>	70
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Tajdīdun Nikāh</i> (<i>Nganyari Nikah</i>) Para Pelaku <i>Ngebo bingung</i>	72

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta ketentraman jiwa dalam ikatan lahir batin antar pasangan.

Manusia adalah makhluk yang lebih mulia dan diutamakan oleh Allah dibandingkan makhluk lainnya. Allah telah menciptakan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya, Allah telah memberikan batas dengan aturan-aturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Berdasarkan pada pasal 2 tersebut menggunakan

¹A. Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2

² Kompilasi Hukum Islam

pernyataan *mīthāqān ghalīẓān* yakni suatu akad perkawinan yang sangat kuat. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 2

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَنَّ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”³

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintah Allah dalam al Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantara Firman-Nya dalam al Qur'an surat an Nur ayat 32⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ . إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.⁶

³ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Kementrian Agama: Jakarta, 2011), 81.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet ke 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 78.

⁶ Al Qur'an dan Terjemahnya (Kementrian Agama: Jakarta, 2011), 354.

Sebagaimana adat yang masih ada pada masyarakat Jawa terhadap kepercayaan hitungan weton bagi calon suami istri yang akan mengadakan perkawinan, ramalan jodoh berdasarkan weton merupakan ramalan yang berasal dari budaya Jawa. Menurut masyarakat weton adalah hari kelahiran seseorang, menurut mereka hitungan weton merupakan hal yang cukup penting karena weton ini dapat mempengaruhi atau menandakan watak seseorang. Ramalan jodoh dilakukan dengan menghitung weton atau pasaran yang mana dari hasil-hasilnya nanti seseorang bisa melihat tentang rejeki,

[illegible]

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan meneliti tentang tradisi *nganyari nikah* akibat dari perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton. Ada beberapa masalah di dalamnya

- [illegible]

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, Pertama; penulis membaca Skripsi saudara Ratna Ayu Anggraini (2014) yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al Nikāh: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”*,¹ dalam Skripsi ini disebutkan bahwa pelaksanaan Tajdid al nikah di Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep *al- Adah Muhakkamah* yang memiliki arti bahwasannya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum jadi kesimpulannya hukum *tajdid nikāh* adalah boleh (mubah). Akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *tajdid nikāh* dijadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun/peramal.

¹ Ratna Ayu Anggarini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al Nikah: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹ Dewi Novita Amaliya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Nganyareh Kabin Bagi Orang Anjhe’ Di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan”, (Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Ketiga; penulis juga pernah membaca Skripsi saudara Muhammad Yuda (2017) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdid Al Nikāh: Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban*”¹. Pada skripsi ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap hitungan weton sebelum akad pernikahan tidak ada larangan dengan memperhitungkan kemaslahatan-kemaslahatan, yakni adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari’ berdasarkan kaidah *al ‘adatul muhakkamah* (adat kebiasaan itu menjadi hukum). Dengan ketentuan bahwa adat (*‘urf*) dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Berdasarkan telaah pustaka yang sebagian telah dipaparkan diatas, maka judul penelitian yang ingin peneliti tulis adalah “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyari Nikah* Pada Perkawinan *Ngebo Bingung* Karena Ketidakesesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang**”.

¹ Muhammad Yuda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah: Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban”, (Skripsi—UINSunan Ampel Surabaya, 2017).

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton di Desa Menganto
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton Di Desa Menganto

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum dalam memandang persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat khususnya masalah tradisi *nganyari nikah* bagi orang yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman dan acuan para tokoh masyarakat agar dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdīd nikāh* pada perkawinan *ngebo bingung* karena ketidaksesuaian weton.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹ Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini yakni:

- 1) 2 Pasangan suami istri yang masih melakukan tradisi *nganyari nikah* dan 2 pasangan suami istri yang mengalami dampak akibat terjadinya perkawinan *ngebo bingung*.
- 2) Tokoh Masyarakat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang yang meliputi seorang Kepala Desa, seorang Kyai Desa, 2 orang Modin desa, dan 2 orang sesepuh kampung.

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen.¹ yang menjadi data sekunder meliputi:

- 1) UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), cet ke 22, 137.

¹ Ibid.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah diambil dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

bab. Kemudian pada tiap bab itu akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya maka penulis uraikan sebagai berikut:

Bab pertama ini penulis akan menguraikan ketertarikan dan alasan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan penelitian ini, seperti yang terdapat dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tentang penjelasan teoritis mengenai pengertian perkawinan, syarat, rukun perkawinan dan hikmah perkawinan. Serta memberikan penjelasan teoritis mengenai pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pandangan para ulama tentang *tajdīdun nikāh*.

Bab ketiga data penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini berisi gambaran umum Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang meliputi letak geografis, social budaya, keagamaan, pendidikan. Serta berisi hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan suami istri yang masih melakukan tradisi *nganyari nikah*. Menjelaskan indicator dari perkawinan *ngebo bingung* dan upaya antisipasi terhadap suami istri yang melakukan perkawinan *ngebo bingung*. Serta penulis akan membahas pokok permasalahan yang diteliti dan menghubungkannya dengan hukum Islam.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.³

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama' ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak

³ Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7.

Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama'. Ulama' Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:⁵

⁵ Ibid.

- a. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama' Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut.⁶

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama' lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan orang tertentu sebagai berikut:⁷

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

⁶Ibid., 46.

⁷Ibid.

Rukun yaitu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin pria atau wanita dalam perkawinan.⁸

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama' yang perbedaan ini bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama' sependapat dalam hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, pria yang akan kawin,

[illegible]

Dari beberapa keterangan terkait dengan rukun dan syarat perkawinan diatas maka dibawah ini merupakan rincian daripada syarat dan rukun perkawinan:

a. Calon mempelai pria

Calon mempelai pria harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan asas kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria yang terikat dalam perkawinan adalah:¹

- 1) Ia tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, perbedaan agama.
- 2) Mendapatkan persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan .
- 3) Ia telah berumur 19 tahun.

Dalam buku *Fikih Munakahat* yang dikarang oleh Tihami dan Sohri Sabrani ada sedikit tambahan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria diantaranya yakni:¹

- 1) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri

¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

¹ Ibid., 109.

¹ Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

c. Wali Perkawinan

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad perkawinan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Adapun syarat-syarat dari wali adalah sebagai berikut:¹

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat bagi seseorang yang melakukan akad.
- 2) Pria, tidak boleh wanita menjadi wali
- 3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

berikut:¹

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar

e. Ijab dan qabul

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz نِكَاح atau

تَزَوُّج, yang terjemahnya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-

kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengankalimat-kalimat yang tidak dari al-Qur'an misalnya menggunakan kalimat *hibah*, *sedekah*, *pemilikan*, dan sebagainya,

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), 64.

dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

Perkawinan wajib dengan akad perkawinan dan dengan lafaz atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Muhammad saw.:¹

إِنْتَفُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

“Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah”.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan dari perkawinan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Ada 3 kata kunci yang disampaikan Allah Swt dalam ayat tersebut, bila dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam yaitu, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmat*. Ulama' tafsir menyatakan bahwasakinahadalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semain

¹ Ibid., 57-59.

8

¹ Kompilasi Hukum Islam, 2. ⁹

a. Untuk melanjutkan keturunan

Islam sangat menekankan perlunya ada lembaga perkawinan karena mempunyai tujuan yang jelas yaitu agar setiap orang memperoleh kekuasaan seksual sebagai bentuk mekanisme mengurangi ketegangan serta dapat mengembangkan keturunan secara sah. Melanjutkan keturunan merupakan penyambung generasi dan cita-cita, memelihara kelestarian jenis, serta pengabdian hidup sebagai manusia, Allah berfirman al-Quran surat an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدهً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenismu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rizki dari yang baik-baik”.

² Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 69.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.

c. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw.

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه بخاري ومسلم)

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Dari tujuan perkawinan yang telah diuraikan, maka bisa diuraikan hikmah yang terkandung didalamnya baik dari segi psikologis, sosiologis, dan kesehatan sebagai berikut:²

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Dalam Islam yang membedakan antara manusia dan hewan adalah dalam penyaluran seksualnya yakni melalui

[illegible]

- Dalam kaitan Rasulullah saw. bersabda:

“Kawinilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai Nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirt kelak”.

- Dengan demikian diantara hikmah perkawinan yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara'. Dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.

4. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup sebagai suami istri.² Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:²

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat...*, 47-48.
² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 189.
² Ibid., 197.

- Disamping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara', terhentinya perkawinan dalam hal ini ada dalam 3 bentuk yakni:²

- [illegible]

6

Para ulama telah mencatat banyak sekali hikmah dan faedah perkawinan, antara lain sebagai berikut.² 7

- ² Muhammad Bagir al Habsyi⁷, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 2

- c. Perkawinan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.

1. Pengertian *Tajdidun Nikāh* (Nganyari Nikah)

Adapun pengertian *tajdidun nikāh* yang terjadi dimasyarakat merupakan suatu akad baru yang dilakukan oleh suami istri yang secara syar’I tidak ada hal-hal yang menyebabkan rusaknya akad sebelumnya, dengan kata lain suami melakukan akad nikah baru dengan istrinya yang

masih sah dengan akad yang baru sedangkan pada akad sebelumnya masih sah.

Tajdidun nikāh disebut juga dengan *ngayari nikah* kalau menurut masyarakat Desa Menganto, pada dasarnya yang dilakukan adalah sama-sama melakukan akad kawin baru sedangkan akad kawin yang pertama masih sah (tidak rusak) hanya saja ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tradisi tersebut.

2. Tujuan *Tajdidun Nikāh* (*Nganyari Nikah*)

Tujuan daripada dilakukannya *tajdidun nikāh* yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yakni:

- a. Sebagai *ihtiyath* (kehati-hatian)

Masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa dalam mengarungi rumahtangganya setiap manusia memiliki kesalahan dan mungkin saa teradi pertengkaran yang tidak disengaja menyebutkan kata-kata talak dan mereka tidak menyadari hal tersebut dengan demikian demi menjaga tali perkawinan maka sebagian masyarakat melakukan *tajdīdun nikāh* sebagai bentuk kehati-hatian dalam perkawinannya.²

- b. Sebagai *tajammul* (memperindah)

² Ratna Ayu Anggarini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Al Nikah: Studi Kasus Desa Pandean, Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi --- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan *tajdidun nikāh* yakni
daat menambah keberkahan pada perkawinannya, sehingga
menjadikan keluarga lebih harmonis.³ 0

c. Sebagai adat (kebiasaan)

Dalam adat Jawa memiliki kearifan dalam menyikapi berbagai problem termasuk dalam perkawinan, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat masih kental dengan upaya adat istiadat sebagai contoh dengan adanya hitungan weton sebelum perkawinan dan adanya larangang perkawinan *ngebo bingung* karena hitungan weton yang tidak sesuai.³

3. Pandangan Para Ulama Terkait Dasar Hukum *Tajdīdun Nikāh* (Nganyari Nikah)

Tajdid nikah atau dalam bahasa Jawa disebut *nganyari nikah* merupakan suatu perbuatan yang sampai sekarang masih ada dan terjadi dimasyarakat. Tradisi ini sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya baik didalam al Quran maupun hadis atau sunnah Nabi. Mengenai dasar hukum dari pelaksanaan *tajdidun nikāh* ini para ulama' ada berbagai macam pendapat. Diantara dari mereka ada yang menyatakan boleh (pendapat *shahih*) dan ada yang menyatakan agar tidak dilaksanakan karena dapat merusak akad yang pertama (pendapat lemah) .

³ Muhammad Yuda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah: Studi Kasus di Desa Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban”, (Skripsi—UINSunan Ampel Surabaya, 2017).

³ Ibid.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Sayyid Abdurrahman, menurut penulis dapat dipahami bahwasannya hukum dari melakukan *tajdīdun nikāh* itu diperbolehkan apabila antara suami dan istri sama-sama rela.

Menurut A. Masduki Machfudh hukum dari *tajdidun nikāh* adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang pertama, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati. Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Ismail, bahwa hukum asal memperbarui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi).³ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya yang menyatakan

³ Masduki Machfudh, *Bahstsal Masail Diniyah* (Malang: PPSNH, 2000), 25.

“sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan iu jelas ...s/d ... sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memerintah atau berhati-hati.”³

5

³ Abdul Aziz. dkk, *Samratus Raudhatu Shaahid* (Kediri: Ponpes Lirboyo, 1990), 145.

Menurut Imam Yusuf al Ardabili dalam kitab al Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak. Dasar pengambilan hukumnya yaitu

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجِ تَيْهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ أَخْرَلَانَّتْهُ إِقْرَارُ الْفُرْقَةِ وَيَتَنَفَّضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَجُّ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan *muhalli*.”³

Dengan demikian ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdidun nikāh* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al Ardabali as Syafi'i.

Dari beberapa pendapat tentang *tajdīdun nikāh* menurut para ahli fiqh diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dari *tajdīdun nikāh* adalah boleh.

³ Ahmad bin Ali bin Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari Juz 13* (Darul Fikr: t, th..), 199.

³ Yusuf al Ardabili As Syafi'I, *al-Anwar li A'mal al-Anwar Juz II* (Dar al Dhiya'), 156.

BAB III

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Menganto

a. Letak Geografis Desa Menganto

Desa Menganto merupakan wilayah yang terletak di wilayah Kecamatan Mojowarno, Secara umum karakteristik Desa Menganto dapat dilihat dari beberapa aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi, dan kondisi iklim.

Desa Menganto Merupakan Desa yang terletak kira-kira 6 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Mojowarno, merupakan desa dataran rendah dengan ketinggian tanahnya 8 m diatas permukaan air laut, mempunyai luas wilayah administrasi 2. 01 Km dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Sidokerto, sebelah timur Desa Selorejo, sebelah selatan Desa Gedangan dan sebelah barat Desa Jarak Kulon. Di Desa Menganto juga terdiri dari 3 dusun yang meliputi Dusun Menganto, Dusun G. Garut, danDusun Kuwasen, dari ke 3 dusun tersebut memiliki 5 RW dan 24 RT sehingga dapat diperinci yakni: Dusun Menganto terdiri dari 3 RW dan 14 RT, Dusun G. Garut terdiri dari 1 RW dan 5 RT, dan Dusun Kuwasen terdiri dari 1 RW dan 5 RT.¹

¹Sumber data: Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa Tahun 2016.

Kondisi social masyarakat Desa Menganto sama seperti masyarakat desa pada umumnya, yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong. Hal tersebut ditunjukkan ketika ada berbagai macam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, para warga dari berbagai dusun di desa tersebut selalu mengikutinya. Ada berbagai macam kegiatan masyarakat diantaranya kegiatan keagamaan seperti *megengan*, tahlilan, diba' dan istighosah.⁴

Tingkat pendidikan berpengaruh pada sumber daya manusia yang ada. Pembangunan yang ada akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi adapun data jumlah pendudukan juga dapat diketahui pada tingkat pendidikannya. Adapun tingkat pendidikan di Desa Menganto pada tahun 2016 meliputi: jenjang pendidikan SD berjumlah 1.307 jiwa, jenjang pendidikan SLTP berjumlah 1.918 jiwa, jenjang pendidikan perguruan tinggi berjumlah 134 jiwa, dan bagi masyarakat yang tidak sekolah atau belum sekolah lagi

⁴Sumber data: Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa Tahun 2016.

Perkawinan adalah salah satu sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan ketika seseorang itu sudah dikatakan mampu untuk menikah. Namun dalam kehidupan yang ada dimasyarakat kita akan menjumpai berbagai macam perkawinan yang masih mengikuti aturan-aturan adat, baik perkawinan yang dianggap sebagai suatu larangan maupun sebagai suatu kebolehan.

⁵Sumber data: Data tingkat pendidikan masyarakat Desa/Kelurahan tahun 2016.

[illegible]

a. Gus Kan

[illegible]

Dari sini kemudian penulis mencoba menjelaskan dengan bahasa penulis sendiri, maksud beliau kalau untuk saat ini biasanya tidak memakai hitungan weton, karena apabila dihitung kemudian tidak cocok hasilnya maka bisa jadi rencana pelaksanaan nikah tersebut batal, menurutnya zaman sekarang seperti peribahasa jawa *kebo nusu gudel* artinya orang tua itu patuh pada anaknya jadi sepertinya semuanya sudah terbalik seharusnya anak itu patuh pada orang tua tapi untuk saat ini lebih condong kepada orang tua yang harus patuh atau menuruti kemauan anaknya.

Menurutnya weton adalah tanggal kelahiran seseorang. Hitungan weton itu sangatlah penting sekali karena kalau kita tak menghiraukannya maka sangatlah berpengaruh pada kehidupan kita, contohnya saja akibat hitungan weton yang tidak sesuai itu terjadi pada anak dan menantu saya sendiri. meskipun zaman sudah semakin modern dan jarang ada orang yang menggunakan hitungan kita harus

[illegible]

5

Faktor yang kedua yakni faktor ekonomi yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh pasangan dari Ika dan mereka menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka pada saat pernah mengalami kesulitan dikarenakan mereka membuka selalu gagal dan tidak pernah berhasil sampai beberapa tahun

e

—

—

—

—

—

Dari berbagai faktor diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tradisi *nganyari nikah* ini hanyalah sebagai motivasi psikis bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka. Menurut hemat penulis meskipun mereka melakukan tradisi ini pada tiap tahunnya baik itu dilakukan berkali-kali namun jika sikap dan perilaku mereka dalam keluarga tidak diubah serta diperbaiki maka semuanya itu akan sia-sia tak berguna.

C. Hitungan Weton Dalam Tradisi *Nganyari Nikah* Menurut Masyarakat Desa Menganto

Dalam melakukan berbagai hajat diantaranya perkawinan kebanyakan orang Jawa mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasaran yang jumlahnya ada 5, tiap hari tentu ada rangkapannya pasaran, jelasnya tiap hari tentu jatuh pada pasaran tertentu.

Menurut perhitungan jawa pada umumnya dikenal 7 hari yang masing-masing mempunyai jumlah berlainan. Adapun rinciannya yakni: hari

¹ Ika, *Wawancara*, Jombang, 17 Desember 2017

Ada juga sisa-sisa yang memiliki makna yang berbeda-beda, diantaranya yakni jika hitungan itu tersisa 1 dan 5 maka artinya bisa atau diperbolehkan menurut keterangan diperbolehkan melakukan perkawinan; jika hitungan itu tersisa 1 dan 6 maka artinya pasangan suami istri tersebut jauh dari sandang pangan; jika hitungan tersebut tersisa 1 dan 9 maka artinya menjadi perlindungan; jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 2 maka artinya keluarga mereka selamat dan banyak rejekinya; jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 6 maka artinya cepat kaya; jika hitungan tersebut tersisa 2 dan 7 maka artinya anaknya banyak yang mati; jika hitungan tersebut tersisa 3 dan 5 maka artinya mereka akan cepat berpisah; jika hitungan tersebut tersisa 3 dan 6 maka artinya dalam keluarga mereka akan mendapatkan kebahagiaan; jika hitungan tersebut

1

2

1) Fauzi lahir minggu legi dan kawin dengan indah (istri) yang lahir pada hari rabu kliwon

2

Hasilnya sisa 1 dan 6 yang artinya jauh sandang pangan, kemudian hasil penjumlahan antara 10 dan 15 itu dijumlah hasilnya menjadi 25.²

Hasilnya sisa 1 dan 7 artinya banyak musuh, kemudian hasil penjumlahan antara 10 dan 16 itu dijumlah hasilnya menjadi 26.²

Hasilnya sisa 3 dan 4 artinya banyak celakanya, kemudian hasil penjumlahan antara 12 dan 13 itu dijumlah hasilnya menjadi 25.²

Neptu hari dan pasaran dari kelahiran calon mempelai pria dan wanita, ditambah dengan neptu pasaran hari perkawinan dan tanggal (bulan jawa) semuanya dijumlahkan kemudian dikurangi/dibuang masing-

² Ainun, *Wawancara*, Jombang,⁵ 17 Desember 2017.

Hasilnya sama-sama sisa 1 artinya tidak baik, lekas berpisah hidup atau mati.²

Selasa (3), pahing (9), hari perkawinannya jum'at (6) tanggal 5
(Saman)

Kamis (8), legi (5), hari perkawinannya jum'at (6) tanggal 5 (Ainun)

Dari hitungan keduanya diketahui sisa 2 yang artinya baik, hidup rukun, sentosa dan dihormati.²

c. Menghitung Hasil Perkawinan

Neptu hari perkawinan dan pasaran dari kelahiran calon mempelai pria dan wanita dijumlah kemudian dikurangi/dibuang masing-masing 4 sampai habis, namun jika menemukan sisa maka akan memiliki beberapa makna diantaranya jika tersisa 1 artinya keluarga tersebut *gentho*, maksudnya jarang anaknya; jika tersisa 2 artinya keluarga tersebut *gembi*, maksudnya banyak anaknya; jika tersisa 3 artinya dalam keluarga tersebut *sri*, maksudnya memiliki banyak rejeki, dan jika tersisa 4 artinya dalam

² Ainun, *Wawancara*, Jombang⁹, 17 Desember 2017.

Contoh :

- Hitungan tersebut diketahui sisa 1 yang artinya jarang anaknya.³

Dalam memperhitungkan perjodohan seseorang harus menghitung jumlah neptu dari hari pasaran kedua calon pengantin tersebut. Menurut

O

³ Ainun, *Wawancara*, Jombang³, 17 Desember 2017.

Hal ini disebabkan 25 apabila dikurangi 24 tinggal 1 angka 1 ini tidak bisa lagi dibagi 2 (alasan nya karena perkawinan melibatkan dua orang). Angka 24 ini diambil dari angka 3 dikalikan 8, jadi pada pokoknya angka yang paling dihindari adalah angka 3.

Sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari seseorang kampung bahwasannya pada ketiga hitungan diatas pada intinya sama saja, karena menurutnya segala sesuatu itu tergantung dari setiap masyarakat. Ada yang memakai hitungan yang pertama, kedua maupun yang ketiga, alasannya karena pujangga menurut orang Jawa ada empat akan tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama yakni mencari ridha Allah, namun

hanya tata caranya saja yang berbeda. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya tata cara perhitungan.

Dari ketiga hitungan diatas hitungan yang paling umum banyak digunakan dimasyarakat adalah hitungan yang kedua biasanya sesepuh kampung menyebutnya dengan hitungan mojopahitan yakni neptu dan pasaran dari kelahiran calon mempelai pria dan wanita, ditambah dengan neptu pasaran hari perkawinan dan tanggal (bulan jawa) semuanya dijumlahkan kemudian dikurangi/dibuang masing-masing 3.

Tujuan penulis mencantumkan ketiga hitungan beserta contohnya tersebut adalah sebagai penambah khasanah keilmuan tentang hitungan jawa agar senantiasa tetap terjaga dan dapat diketahui oleh banyak pihak yang mungkin saja ada yang belum mengetahuinya.

BAB IV

A. Pelaksanaan Perkawinan Para Pelaku *Ngebo Bingung*

Perkawinan ialah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Perkawinan juga merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi seseorang. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan. Umumnya perkawinan dijalani untuk membentuk keluarga, tergantung budaya setempat banyak perkawinan yang mempunyai tata cara yang berbeda-beda. Apalagi Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam, meski zaman sudah modern tapi orang-orang Indonesia masih tetap berpegang teguh pada adat-adat yang diwariskan oleh leluhurnya.

Adapun diantara banyaknya tujuan perkawinan yang sudah disebutkan di bab 2 salah satunya adalah untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat an-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Terkait dengan perkawinan *ngebo bingung* sendiri adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dalam hitungan wetonnya tidak sesuai, namun mereka tetap melakukan perkawinan tersebut sehingga pada kehidupan yang akan datang mereka akan dibuat bingung dengan keputusan yang mereka buat sendiri, dalam aturan adat jawa sebaiknya mereka tidak melakukan perkawinan tersebut karena dikhawatirkan berpengaruh terhadap kehidupan rumahtangganya. Masalah ketidak sesuaian weton dengan kehidupan rumahtangga menurut penulis sebenarnya tidak ada kaitannya, didalam hukum islampun tidak diatur bahkan tidak ada dalil syara' yang menjelaskannya.

Pelaksanaan perkawinan *ngebo bingung* yang dilakukan oleh para pasangan yang melakukan *ngebo bingung* sebenarnya sudah sesuai dengan aturan perkawinan pada umumnya. Terkait syarat dan rukun perkawinan juga sudah terpenuhi, seperti adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, adanya wali perkawinan, saksi perkawinan dan ijab qabul. Namun karena perkawinan tersebut dilakukan lantaran hitungan weton yang tidak sesuai maka dari sini keragu-raguan dan kekhawatiran muncul dihati para pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut.

untuk melanggengkan kembali kehidupan rumah tangga yang telah rusak karena berbagai sebab. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemertanian yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat dilakukan dengan cara melakukan pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

untuk melanggengkan kembali kehidupan rumah tangga yang telah rusak karena berbagai sebab. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemertanian yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat dilakukan dengan cara melakukan pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

untuk melanggengkan kembali kehidupan rumah tangga yang telah rusak karena berbagai sebab. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemertanian yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat dilakukan dengan cara melakukan pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

untuk melanggengkan kembali kehidupan rumah tangga yang telah rusak karena berbagai sebab. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemertanian yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat dilakukan dengan cara melakukan pemertanian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang terdampak oleh suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

hanya digunakan sebagai motivasi saja agar pasangan suami istri dapat merubah sikap dan mampu menyikapi segala bentuk permasalahan.

Pelaksanaan *tajdidun nikāh* (*nganyari nikah*) yang dilakukan oleh para pelaku *ngebo bingung* tersebut tetap seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya yakni adanya kedua mempelai pria dan wanita, adanya 2 orang saksi, adanya *ijab qabul* dan adanya mahar. Namun *tajdidun nikāh* (*nganyari nikah*) yang dilakukan oleh pelaku *ngebo bingung* di Desa Menganto tersebut tidak menggunakan mahar baru dan dalam hal ini yang mengijabkan kembali adalah seorang Kyai atau Mudin desa setempat dan hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga dan saksi dari pihak mempelai wanita.

Tajdidun nikāh merupakan suatu upayaantisipasi yang dilakukan oleh masyarakat apabila dalam kehidupan rumahtangga sering terjadi berbagai konflik dalam keluarga, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Segala pertimbangan yang dilakukan terhadap tradisi *nganyari nikah* adalah untuk memperlihatkan manfaatnya yaitu semakin bertambahnya keharmonisan rumah tangga dan menghindari madharat yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya.

Sebenarnya mereka tidak perlu melakukan akad baru karena ketidaksesuaian weton, karena akad yang lama masih berkekuatan hukum, hanya saja penulis meyakini dan menyadari bahwa kemantapan masyarakat sedikit banyak telah goyah karena kekhawatiran menikah dengan hitungan weton mereka yang tidak sesuai. Untuk itu mereka melakukan *nganyari nikah*

Dengan demikian menurut hemat penulis jika dikaitkan dengan keterangan diatas pelaksanaan *nganyari nikah* merupakan suatu upaya kehati-hatian yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendatangkan kemaslahatan pada keluarga atau pasangan suami istri yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* serta untuk menghindari segala kemudharatan yang terajdi.

Dalam hukum Islam sendiri terkait masalah hitungan weton memang tidak dijelaskan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dalam bukunya Gus Mus menjelaskan bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya sepanjang tradisi itu tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Tapi kalau sudah menyalahi prinsip agama apalagi kalau menyangkut akidah seperti masalah “*petungan nasib*” tentunya kita harus berhati-hati. Kita umat Islam mempunyai keyakinan bahwa segala yang berlaku didunia, termasuk terhadap diri kita, baik atau buruk adalah dari Allah. Dan untuk pedoman hidup hamba-hamba-Nya agar selamat dan bahagia didunia dan diakhirat, Allah telah mengutus utusan-Nya dan menurunkan Kitabnya.

[illegible]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Allah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda adalah untuk saling mengenal kelebihan masing-masing. Bukan malah untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan saling menyalahkan. Serta untuk saling menghormati dan saling belajar menghargai dalam hidup berdampingan.

¹Al Qur'an dan Terjemahnya (Kementrian Agama: Jakarta, 2011), 517.

Dari keterangan diatas maka dapat dicermati bahwa sebelum pasangan perkawinan *ngebo bingung* itu melakukan *nganyari nikah* biasanya mereka terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang tua atau seseorang yang ditunjuk keduanya untuk memberikan petuah, dalam hal ini biasanya adalah kyai setempat atau sesepuh kampung yang sangat dituakan.

[illegible]

الْحَالُ بَيِّنٌ وَبَيْنُهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه البحارى)

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan diantara keduanya terdapat hal musyabbihat/yang samar-samar, yang tidak dikehendaki oleh kebanyakan manusia, maka barangsiapa yang menjaga hal-hal yang musyabbihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.”(HR. Bukhari).²

Kemudian apabila memperbarui nikah dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan yang pertama kurang baik, dan telah sekian lama menikah kemudian khawatir pernah mengucapkan talak maka hal tersebut masuk pada pendapat yang lemah sehingga pada intinya tidak diperkenankan melakukan *nganyari nikah*, karena dapat merusak akad yang pertama. sebagaimana yang telah

[illegible]

disampaikan oleh Imam Yusuf al Ardabili dalam kitab al Anwar wajib membayar mahar karena sebagai pengakuan jatuhnya talak. Dasar pengambilan hukumnya yaitu

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجِ تَيْهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ أَخْرَلَانَّتَهُ إِقْرَارًا بِالْفُرْقَةِ وَيَتَنَفَّضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَجُّ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan *muhalli*.”

Masyarakat Desa Menganto sendiri memandang bahwa tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* ini adalah suatu tradisi yang baik dan bermanfaat bagi keluarga yang mengalami berbagai macam persoalan karena perkawinan *ngebo bingung*. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang baik sisi manfaat dan madharatnya terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* ini maka alangkah lebih baiknya bagi keluarga yang melakukan perkawinan *ngebo bingung* ini melakukan *nganyari nikah*. Daripada mereka harus dalam permasalahan dan percekcoan yang berkepanjangan sehingga dikhawatirkan terjadi perceraian maka sebaiknya melakukan tradisi tersebut.

Tradisi *nganyari nikah* tersebut merupakan suatu adat yang sudah mengakar dimasyarakat, sedangkan adat sendiri itu dapat digunakan sebagai sumber hukum islam, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat hukum islam. Jika membahas tentang adat maka tidak akan terlepas manfaat dan madharat yang muncul.

“Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum”

Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah *muamalah* (kemasyarakatan). Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:

- [illegible]

Dengan demikian adat yang baik sebagai sumber hukum islam adalah hukum adat yang aturan-aturan pokoknya tidak bertentangan dengan *nash* dan syariat hukum islam. Karena apabila adat itu bertentangan dengan hukum islam maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam.

Jadi dengan melihat berbagai penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwasannya *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut bisa dikatakan sebagai adat, karena hal tersebut adalah suatu kebiasaan/tradisi yang muncul dan ada dimasyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum islam terkait pelaksanaan *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan yang ada dalam keluarga.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari hasil penelitian yang sudah ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai analisis hukum Islam terhadap tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang:

1. Pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* pada perkawinan *ngebo bingung* di desa Menganto dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Namun ada yang membedakan, pada pelaksanaan tradisi ini tanpa menggunakan adanya mahar baru, dan yang mengijabkan adalah seorang Kyai desa atau mudin setempat serta hanya dihadiri oleh beberapa sanak keluarga terdekat saja.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi *nganyari nikah* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *ngebo bingung* tersebut diperbolehkan (mubah), karena dalam sistem pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam serta memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan yang ada dalam keluarga.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis berharap alangkah baiknya jika para tokoh masyarakat menjelaskan terkait dengan pelaksanaan nganyari nikah kepada masyarakat, khususnya bagi tokoh agama yang benar-benar paham hukum Islam secara mendalam agar masyarakat yang melakukan



- Machfudh, Masduki. *Bathsul Masail Diniyah*. Malang: PPSNH, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Mus, Gus. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista Surabaya, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Ki. *Primbon Pria & Wanita*. T.p.t: Global Mandiri, T.t.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, Sabrani Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: pustaka al kautsar, 1998.
- Yuda, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah: Studi Kasus di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- t. p., *Al Qur’an dan Terjemahnya*. Kementrian Agama: Jakarta, 2011.
- Hadis dari Imam Bukhari Juz 3 No. 1905
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan